

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

RKPD merupakan penjabaran atas sasaran dan program dalam RPJMD, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada setiap tahunnya, serta penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan visi dan misi kota Surabaya.

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2017, sebagaimana dituangkan dalam Perubahan RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2016, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, perumusan program pada tahun 2016 berbeda dengan tahun 2017-2021 sehingga ada sejumlah program yang perencanaannya hanya berlaku satu tahun. Hal ini disebabkan tahun 2016 merupakan masa transisi dimana RPJMD tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya dan belum ada penetapan dokumen RPJMD periode berikutnya. Meskipun demikian, perumusan RKPD tahun 2016 ini tetap menjadi bagian dalam perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengukuran pelaksanaan program RKPD Tahun 2016 dapat disampaikan bahwa sebanyak 14,86% indikator program Tahun 2016 atau 26 indikator dari total 175 indikator program memiliki capaian dibawah 100%, yakni:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada indikator Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural dengan capaian sebesar 80,72%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan

karena kurang optimalnya peningkatan kompetensi pejabat struktural, yaitu 30,71% pejabat belum mengikuti diklat struktural.

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan dengan capaian sebesar 93,11%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan sebanyak 16,38% laporan hasil pemeriksaan (LHP) baru bisa ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir pada indikator Produktivitas Usaha Garam dengan capaian sebesar 1,96%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena sangat rendahnya produktifitas pertanian garam, yaitu hanya 1,6 ton garam per hektar.
4. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada indikator Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada dengan capaian sebesar 89,63%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena luasan RTH Optimal hanya 36,88% dari luasan seluruh RTH Kota Surabaya, dari target sebesar 41,15% di tahun 2016.
5. Program Pengelolaan Kebersihan Kota pada indikator Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA dengan capaian sebesar 87,76%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA mencapai 1571,31 ton per hari.
6. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan pada indikator Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan dengan capaian sebesar 84,39%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena rendahnya cakupan pembinaan pemuda yaitu hanya 84,39% dari 11.615 pemuda yang direncanakan akan dibina di tahun 2016.
7. Program Pengembangan Sistem Transportasi pada indikator Persentase penggunaan kendaraan umum (*Load Factor*) dengan capaian sebesar 87,12%, pada indikator Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Primer dengan capaian 94,77%, pada indikator Kecepatan perjalanan rata-rata kendaran di Jalan Arteri Sekunder dengan capaian 91,70%, pada indikator Rata-rata *Headway* Angkutan Umum (Angkot) dengan capaian

97,72% serta pada indikator Rata-rata *Headway* Angkutan Umum (Bus Kota) dengan capaian 96,89%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena:

- a. Kurang optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari *headway* maupun *load factor*-nya
 - b. Kurang seimbangnya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan.
8. Program Pendidikan Menengah pada indikator Persentase Siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi dengan capaian sebesar 0%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan.
9. Program Pendidikan Anak Usia Dini pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD dengan capaian sebesar 49,89%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena partisipasi murni PAUD hanya 49,40%.
10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dengan capaian sebesar 90,37%, pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dengan indikator 96,03%, serta pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dengan indikator 96,48%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena:
- a. Partisipasi murni SD/MI hanya 83,75%
 - b. Partisipasi kasar SMP/MTs hanya 85,14%.
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dengan capaian 85,61% dan indikator Persentase Dokumen keuangan yang selesai tepat waktu dengan capaian sebesar 89,19%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena:
- a. Keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan
 - b. Rendahnya realisasi dana perimbangan
 - c. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi.
12. Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dengan indikator Persentase kemampuan

penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani capaian sebesar 87,10%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena kurangnya cakupan penyuluh terhadap kelompok tani yang seharusnya didampingi yaitu 69,68%.

13. Program Pengendalian Banjir pada indikator Tingkat Genangan dengan capaian sebesar 63,34%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena tingkat genangan yang masih relatif tinggi yaitu 41,95 dari target sebesar 30,7.
14. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan pada indikator Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih dengan capaian sebesar 0%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota.
15. Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada indikator Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan capaian sebesar 68,70%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena kurang optimalnya luasan bangunan dan tanah yang diadakan yaitu hanya 68,7% dari 43.367 meter persegi.
16. Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota pada indikator Rasio aset pemkot yang tersertifikat dengan capaian sebesar 85,21%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena aset tanah pemkot yang tersertifikat hanya 47,48% dari 1.567 aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan.
17. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan pada indikator Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi dengan capaian sebesar 97,77%. Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena belum 100% tenaga kesehatan teregistrasi dan hanya 97,77% saja yang STR-nya aktif.
18. Program Penataan Administrasi Kependudukan pada indikator Persentase Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian) dengan capaian sebesar 50,65% dan indikator cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK) dengan capaian 99,56%.

Tidak tercapainya target program ini disebabkan karena Banyak masyarakat masih terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, yakni sebanyak 54,77% atau 13.490 pemohon akta kematian terlambat (lebih dari 30 hari sejak tanggal kematian), dan sebanyak 47,40% atau 27.965 pemohon akta kelahiran terlambat (lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian program di atas, maka dirumuskan identifikasi permasalahan pembangunan, termasuk faktor penghambat beserta tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun 2018. Adapun hasil identifikasi tersebut tercantum pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Identifikasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2016 dan Tindak Lanjut yang Diperlukan

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*	Masih rendahnya jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	Penyelenggaraan diklat sangat tergantung pada jadwal penyelenggaraan diklat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Antisipasi terhadap jadwal penyelenggaraan diklat yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Masih rendahnya jumlah tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada tahunberikutnya	Tidak berimbangnya jumlah auditor dengan kebutuhan pemeriksaan yang ada (354 temuan)	Penambahan jumlah auditor dan peningkatan kompetensi auditor
3.	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Sangat rendahnya produktifitas pertanian garam	1. Lemahnya penerapan teknologi dalam produksi garam sehingga sangat tergantung pada kondisi cuaca 2. Adanya perubahan iklim/cuaca sehingga jumlah hari hujan per bulan lebih tinggi 9% dari tahun sebelumnya menjadi sebanyak 11,5 hari per bulan	Pengembangan Teknologi Tepat Guna, salah satunya sedang dilakukan uji coba produksi garam dengan teknologi rumah kaca
4.	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Optimal terhadap luasan seluruh RTH Kota Surabaya masih relatif kurang	1. Status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan lahan RTH yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kota 2. Adanya kendala pasang surut air laut terutama di kawasan pesisir	1. Prioritisasi jenis RTH yang perlu dioptimalkan serta prioritisasi lokasi berdasarkan analisa kebutuhan 2. Analisis permasalahan secara rutin untuk target lokasi dan luasan yang seharusnya dioptimalkan namun belum tercapai

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
5.	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Kebersihan Kota	Relatif tingginya volume sampah yang dikelola di TPA	Tingginya aktivitas perdagangan dan jasa mempengaruhi peningkatan volume sampah hotel, apartemen, dan mall, demikian pula migrasi penduduk di sekitar wilayah Surabaya juga mempengaruhi peningkatan volume sampah rumah tangga	<p>1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap produksi volume sampah dan sumber-sumber yang berkontribusi cukup dominan dalam peningkatan produksi sampah kota, untuk mempermudah penentuan intervensi terhadap objek-objek yang disasar</p> <p>2. Peningkatan upaya pengurangan produksi sampah melalui 3R serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penerapan 3R serta pemilahan sampah</p> <p>3. Peningkatan jumlah TPS dengan pengelolaan sampah mandiri/3R, untuk mengurangi beban volume sampah yang dikelola TPA</p>
6.	Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belum optimalnya cakupan pembinaan pemuda	Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kegiatan pembinaan kepemudaan	Variasi kegiatan pembinaan untuk menyesuaikan kebutuhan dan latar belakang pemuda yang diberi pembinaan
7.	Urusan Wajib Bidang Perhubungan	Program Pengembangan Sistem Transportasi	<p>1. Kurangnya optimalnya kinerja angkutan umum, baik dari <i>headway</i> maupun <i>load factor</i>-nya</p> <p>2. Kurang seimbang nya pertumbuhan penggunaan kendaraan pribadi dengan pertumbuhan pembangunan jaringan jalan</p>	<p>1. Menurunnya kualitas angkutan umum disebabkan minimnya perawatan</p> <p>2. Terdapat pilihan moda angkutan lain yang lebih nyaman dan terjangkau (taksi <i>online</i>)</p> <p>3. Pertumbuhan kendaraan pribadi kurang sebanding dengan pembangunan jaringan jalan sehingga terjadi penurunan kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer dan sekunder</p>	<p>1. Dilakukan restrukturisasi angkutan umum</p> <p>2. Percepatan proses pembangunan Angkutan Massal dan pelaksanaan <i>traffic demand management</i></p>
8.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Menengah*	Tidak terealisasinya ujian sertifikasi kompetensi siswa kejuruan	Tidak ada dukungan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi siswa kejuruan, karena kegiatan sertifikasi tidak dilaksanakan pada siswa yang telah lulus tahun 2016 dan adanya proses pelimpahan P2D (Personil, Peralatan dan Dokumen) ke Provinsi Jawa Timur	-

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
9.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Pendidikan Anak Usia Dini*	Masih rendahnya partisipasi murni PAUD	Banyaknya usia siswa PAUD yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan (5,35% siswa PAUD masih dibawah usia 3 tahun), terlebih lagi, batas usia atas yang melanjutkan ke jenjang SD/MI terlalu dini	Edukasi pada orang tua/ wali siswa supaya menyekolahkan PAUD di usia yang tepat, serta tidak terlalu dini untuk masuk ke jenjang SD/MI
10.	Urusan Wajib Bidang Pendidikan	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*	1. Belum optimalnya partisipasi murni SD/MI 2. Belum optimalnya partisipasi kasar SMP/MTs	1. Banyaknya usia siswa SD/MI yang batas usianya tidak sesuai dengan yang ditentukan, khususnya batas bawah usia yang melanjutkan dari PAUD 2. Terbatasnya kapasitas SMP/MTs atau banyaknya warg Surabaya usia 13-15 tahun yang bersekolah di luar kota	1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan dasar dengan pemerataan perbaikan sarana dan prasarana sekolah 2. Biaya pendidikan dasar sembilan tahun yang gratis
11.	Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan 3. Rendahnya penyerapan belanja DAK dan bantuan keuangan provinsi 4. Rendahnya realisasi lain-lain pendapatan yang sah	1. Adanya keterlambatan dalam penyusunan dokumen keuangan yang melibatkan pihak eksternal BPKPD & Pemerintah Kota Surabaya 2. Rendahnya realisasi dana perimbangan karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Pusat (Permenkeu Nomor 249/PMK.07/2015 dan 162/PMK.07/2016) 3. Adanya ketidakjelasan dalam Petunjuk teknis penggunaan dana baik pemerintah pusat maupun Propinsi Jawa Timur yang mempengaruhi realisasi belanja 4. Adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah karena adanya penyesuaian kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Timur	1. Perbaikan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mengefektifkan metode dalam proses penyusunan dokumen keuangan, sehingga pihak-pihak eksternal dapat berkontribusi terhadap percepatan penyusunan 2. Mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
12.	Urusan Pilihan Bidang Pertanian	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Masih kurangnya cakupan penyuluh terhadap jumlah kelompok tani	Kelompok tani yang didampingi tidak aktif lagi karena masalah internal, alih profesi, dll.	1. Pendampingan lebih intensif 2. Fasilitasi permodalan dg stakeholder yang menawarkan program kredit rakyat 3. Pengalihan dari komoditas segar ke olahan
13.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	Masih relatif tingginya tingkat genangan	1. Curah hujan lebih tinggi 7% dari tahun sebelumnya, mencapai 240,9 mm 2. Pembangunan pompa masih berproses 3. Saluran belum terintegrasi secara keseluruhan 4. Kurangnya daerah resapan karena semakin banyaknya kawasan terbangun	Percepatan proses pembangunan pompa dan saluran secara terintegrasi
14.	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan*	Tidak terealisasinya Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan oleh Pemerintah Kota	Berdasarkan rekomendasi dari DPRD Kota Surabaya, pembangunan infrastruktur jaringan air bersih harus melalui penyertaan modal ke PDAM terlebih dahulu	Melakukan upaya koordinasi dengan PDAM secara intensif
15.	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*	Luasan bangunan dan tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu ditingkatkan	1. Waktu proses administrasi yang cukup panjang 2. Melibatkan beberapa instansi serta masyarakat 3. Terbatasnya anggaran yang tersedia	Percepatan proses pengadaan tanah dengan mengefektifkan dan mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait
16.	Urusan Wajib Bidang Pertanahan	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	Masih kurangnya realisasi jumlah aset tanah pemkot yang tersertifikat dibandingkan jumlah aset yang diprioritaskan untuk disertifikatkan	Kendala dalam pemenuhan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan permohonan sertifikasi (bukti perolehan pengadaan tanah, bukti penguasaan atas tanah)	1. Pemenuhan dokumen persyaratan permohonan sertifikasi 2. Koordinasi dengan instansi terkait

No.	Urusan	Program RKPD 2016	Identifikasi Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat	Tindak Lanjut
17.	Urusan Wajib Bidang Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan*	Masih adanya tenaga kesehatan yang belum teregistrasi	Beberapa tenaga kesehatan telah habis masa berlaku STR (Surat Tanda Registrasi)-nya di bulan Desember, sehingga harus menunggu proses perpanjangan STR di PTSP Provinsi Jatim selama 12 hari.	Melakukan updating rutin, serta secara aktif mengingatkan personil tenaga kesehatan yang telah habis masa berlaku STR-nya, dan mendorong untuk segera memperbarui
18.	Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan*	Masih banyak masyarakat yang terlambat dalam mengajukan pengurusan dokumen pencatatan sipil, baik akta kematian maupun akta kelahiran	Kurangnya kesadaran dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk segera mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran dan kematian	Melaksanakan publikasi dan sosialisasi yang inovatif dan persuasif lewat berbagai media, selain tetap menerapkan denda bagi pemohon yang terlambat

Keterangan: *) merupakan program prioritas penunjang Visi-Misi sebagai Amanat Nasional dalam RPJMD 2016-2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II

Berbeda dengan evaluasi hasil RKPD 2016 pada sub bab sebelumnya, proses evaluasi hasil RKPD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II tidak melibatkan perhitungan indikator program RKPD dikarenakan proses pengumpulan data urusan pemerintahan daerah yang baru tersedia di akhir triwulan III. Karena itu, evaluasi didasarkan pada progres pelaksanaan kegiatan sebagai wujud teknis pelaksanaan program pembangunan daerah.

Progres pelaksanaan masing-masing kegiatan pada RKPD tahun 2017 sampai dengan triwulan II, idealnya sudah mencapai 50 persen atau lebih. Namun berdasarkan hasil evaluasi dapat disampaikan sejumlah permasalahan sebagai berikut:

1. Sebagian besar program pembangunan yang dilaksanakan yaitu sebanyak 75,49% dari total program atau 77 program dari 102 program, memiliki progres pencapaian *output* kegiatan di bawah 50%;
2. Diantara 77 program tersebut, 13 program di antaranya belum terdapat realisasi *output* kegiatan sama sekali, atau progres pencapaian outputnya 0%. Hal ini disebabkan antara lain karena *output* kegiatan pada program-program tersebut, sebagian besar, baru akan terealisasi pada Triwulan III dan IV.

Adapun progres pencapaian output kegiatan pada keseluruhan program pembangunan RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II, terdapat pada tabel berikut 2.2 :

Tabel 2.2
Progres Pencapaian *Output* Kegiatan
dari Program RKPD 2017 sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian <i>Output</i> Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
1	1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	24,19%	17,26%
2	1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum	42,54%	20,43%
3	1.1.1.01.03	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26,73%	17,23%
4	1.1.1.01.04	Program Peningkatan Prestasi	47,17%	15,21%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
5	1.1.1.01.05	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	42,22%	5,46%
6	1.1.1.01.06	Program Pendidikan Kesetaraan	22,78%	26,22%
7	1.1.1.01.07	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	36,84%	22,81%
8	1.1.1.02.01	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	48,22%	45,26%
9	1.1.1.02.02	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	55,46%	23,73%
10	1.1.1.02.03	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	0,00%	31,28%
11	1.1.1.02.04	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu (dan Jaringannya)	18,13%	18,25%
12	1.1.1.02.05	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu	23,54%	7,87%
13	1.1.1.02.06	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	62,99%	30,62%
14	1.1.1.02.07	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	31,48%	17,41%
15	1.1.1.02.08	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	38,64%	37,90%
16	1.1.1.02.09	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	47,32%	29,09%
17	1.1.1.03.01	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	20,89%	13,74%
18	1.1.1.03.02	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	27,57%	16,86%
19	1.1.1.03.03	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	0,00%	0,00%
20	1.1.1.03.04	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	57,79%	34,74%
21	1.1.1.03.05	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	100,00%	17,50%
22	1.1.1.03.06	Program Perencanaan Ruang Kota	0,00%	28,12%
23	1.1.1.03.07	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	60,44%	38,36%
24	1.1.1.04.01	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	27,89%	18,79%
25	1.1.1.05.01	Program Penegakan Peraturan Daerah	53,44%	40,77%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
26	1.1.1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	54,87%	21,20%
27	1.1.1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	42,58%	21,65%
28	1.1.1.06.01	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	49,28%	22,86%
29	1.1.1.06.02	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	25,55%	28,18%
30	1.1.2.01.01	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	59,76%	30,53%
31	1.1.2.01.02	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	39,96%	18,88%
32	1.1.2.01.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	83,59%	27,69%
33	1.1.2.01.04	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	17,67%	21,63%
34	1.1.2.02.01	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	69,38%	30,78%
35	1.1.2.02.02	Program perlindungan perempuan dan anak	48,66%	25,28%
36	1.1.2.03.01	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	44,73%	22,96%
37	1.1.2.04.01	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	60,65%	34,84%
38	1.1.2.04.02	Program pengamanan aset	32,78%	29,54%
39	1.1.2.04.03	Program pengelolaan aset	54,42%	33,89%
40	1.1.2.05.01	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	43,92%	23,69%
41	1.1.2.05.02	Program pengelolaan kebersihan	47,79%	21,57%
42	1.1.2.05.03	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	50,96%	28,39%
43	1.1.2.05.05	Program Upaya Konservasi Energi	0,00%	17,25%
44	1.1.2.05.08	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	0,00%	10,74%
45	1.1.2.06.01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	42,82%	31,31%
46	1.1.2.08.01	Program Keluarga Berencana	36,63%	24,19%
47	1.1.2.08.02	Program Bina Keluarga	79,35%	48,10%
48	1.1.2.08.03	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	41,82%	23,96%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
49	1.1.2.09.01	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	47,54%	18,68%
50	1.1.2.09.02	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	15,79%	18,63%
51	1.1.2.09.03	Program manajemen lalu lintas angkutan barang	0,00%	57,18%
52	1.1.2.11.02	Program perkuatan permodalan usaha mikro	100,00%	17,72%
53	1.1.2.11.03	Program standarisasi produk usaha mikro	36,90%	20,66%
54	1.1.2.11.04	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	41,80%	26,96%
55	1.1.2.11.05	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	37,32%	20,64%
56	1.1.2.12.01	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	0,00%	15,38%
57	1.1.2.12.03	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	7,14%	27,52%
58	1.1.2.12.04	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	43,33%	37,86%
59	1.1.2.13.01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	55,35%	25,44%
60	1.1.2.13.02	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	44,69%	23,08%
61	1.1.2.16.01	Program perlindungan budaya lokal	0,00%	22,20%
62	1.1.2.16.02	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	33,01%	18,29%
63	1.1.2.16.03	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	38,39%	20,26%
64	1.1.2.17.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	31,96%	22,12%
65	1.1.2.18.01	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	42,68%	35,63%
66	1.1.2.10.01	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	26,73%	15,41%
67	1.1.2.10.02	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	39,21%	27,32%
68	1.1.2.14.01	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	0,00%	17,85%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
69	1.2.2.03.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	60,00%	17,85%
70	1.2.2.03.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	39,73%	18,08%
71	1.2.2.03.04	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	55,99%	10,29%
72	1.2.2.03.05	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	50,00%	18,29%
73	1.2.2.02.01	Program pengembangan destinasi wisata	12,83%	25,63%
74	1.2.2.02.02	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	20,83%	22,60%
75	1.2.2.02.03	Program Pemasaran Pariwisata	7,24%	32,79%
76	1.2.2.02.04	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	43,13%	26,66%
77	1.2.2.02.05	Program legalisasi usaha kreatif	0,00%	13,80%
78	1.2.2.02.06	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	0,00%	12,15%
79	1.2.2.01.01	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	11,11%	4,57%
80	1.2.2.01.02	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan	0,00%	11,94%
81	1.2.2.06.01	Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	25,00%	24,56%
82	1.2.2.06.03	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	50,74%	36,02%
83	1.2.2.06.04	Program perluasan jangkauan pemasaran	44,83%	17,97%
84	1.2.2.06.05	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	40,48%	24,77%
85	1.2.2.06.06	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	85,71%	39,49%
86	2.1.2.01.01	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	29,17%	27,97%
87	2.1.2.01.02	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	41,84%	20,25%

No	Kode	Program RKPD 2017	Rata-Rata Capaian Output Kegiatan	Capaian Serapan Anggaran Program
88	2.1.2.02.01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	55,94%	33,05%
89	2.1.2.02.02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	50,00%	34,99%
90	2.1.2.03.01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	25,00%	19,97%
91	2.1.2.03.02	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	45,92%	31,64%
92	2.1.2.03.03	Program Penataan Daerah Otonom	50,10%	31,65%
93	2.1.2.03.04	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2,26%	35,67%
94	2.1.2.03.05	Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	35,56%	19,80%
95	2.1.2.03.06	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	47,73%	38,63%
96	2.1.2.03.07	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	32,68%	15,80%
97	2.1.2.03.08	Program Kerjasama Bidang Perdagangan	0,00%	15,56%
98	2.1.2.03.09	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	20,00%	61,46%
99	2.1.2.04.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	48,45%	30,05%
100	2.2.2.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40,86%	27,74%
101	2.2.2.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54,38%	34,89%
102	2.2.2.02.02	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	48,53%	24,25%
Rata-Rata			36,68%	24,74%

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan progress pencapaian output kegiatan pada Program RKPD 2017 sampai dengan triwulan II sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukantindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan, terutama untuk program yang progres pencapaian output kegiatannya 0%. Upaya tindak lanjut pada Triwulan III dan IV dari RKPD 2017, meliputi:

1. Percepatan pencapaian target kinerja kegiatan yang mundur dari jadwal pelaksanaannya (*re-schedule*), sehingga *outcome* program yang diharapkan dapat segera terwujud;
2. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang memang pencapaian target kinerjanya direncanakan pada Triwulan III dan IV Tahun 2017.

2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana pembahasan di atas, capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya sampai dengan triwulan II Tahun 2017 mendapatkan predikat “tinggi” untuk capaian kinerja dengan rata-rata sebesar 130,90% dari maksimal 150% dan predikat “sedang” untuk capaian penyerapan anggaran dengan rata-rata sebesar 110,29% dari maksimal 150% yang berasal dari capaian kinerja dan anggaran tahun 2016 (94,22% dan 85,55%) dan capaian kinerja dan anggaran tahun 2017 sampai dengan Triwulan II (36,68% dan 24,74%). Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai triwulan II tahun 2017 dijelaskan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 sebagai berikut :